

# JEJAK LANGKAH MEMBANGUN ORGANISASI ANAK KETURUNAN TRANSMIGRAN REPUBLIK INDONESIA – PATRI <sup>1)</sup>

Disusun Oleh:  
Sunu Pramono Budi\*

## Abstract

- PATRI is represent one of stake holder and especial share holder of transmigration. PATRI expected also can become the partner government in course of management and transmigration development in Indonesia
- Membership PATRI to cover the local good Transmigrant descendant, also ex colonization, ex romusha, ex koeli contract, and ex repatriate Suriname
- PATRI very jell hotly Nationalism, overshadowed by care tearing of NKRI. Though, during the time transmigrant is one of supporter element of the happening of national integration, cultural acculturation, and glue of cross religion national, tribe, and culture
- Attendance PATRI to represent the symbol of resistance spiritual to various act of impunities which during the time befall the transmigrate citizen. That is why, various area of transmigration receiver, support and enthusiasm to big PATRI so preparation And organized birth very simple at date of 16 February 2004 also become the forerunner, that naturally child of transmigrated descendant have earned the potency organization owned
- Concern, manful, patience, and even food insufficiency which have been experienced of by the children of past transmigrant exactly make the education bounce becoming trigger efficacy compete the life nature
- Experienced school like that it is true is only owned by all cadres PATRI.
- Therefore, that simple full of mental attitude endowment become the authorized capital develop; build and enlarge the future PATRI

---

<sup>1)</sup> Tulisan ini adalah versi singkat dari tulisan yang pernah dimuat dalam Jurnal Dinamika Masyarakat (ISSN:1412-6192), diterbitkan oleh Kantor Menristek, Vol.VI, No.2, Agustus 2007 hal. 1218-1234, dengan judul asli: *Potensi Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengembangan Komunitas Kreatif: Kasus Organisasi Anak Keturunan Transmigran Republik Indonesia*.

<sup>\*</sup>) Nama lengkapnya Ir. H.Sunu Pramono Budi, MM (biasa disingkat Hasprabu). Adalah anak keturunan transmigran dari Proyek Transpolri Jayaguna II di Gunung Sugih, Lampung Tengah, tahun penempatan 1972. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (DPP PATRI).

- Pursuant to existing data, have a lot of child of transmigrant descendant which have become the functionary of echelon I, echelon II, Mayor, Regent, Regent Proxy, Professor, Doctor, Top Brass TNI / police, LSM, Entrepreneur, Legislative Member, and others
- Expected by a PATRI become a organization of cadre contributor which have been tested psychologically, physical, and also bounce it, as custodian of the straighten of Totalitarian State this beloved Republic of Indonesia.

## PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, saat ini banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) didirikan di Indonesia. Baik ormas yang berlatar belakang keagamaan, kedaerahan, kesukuan, dan kebudayaan.

Namun demikian, diantara ratusan organisasi kemasyarakatan tersebut, ada satu organisasi lintas agama, suku, dan budaya yang mempunyai jumlah anggota sekitar 40 juta; tetapi banyak belum diketahui.

Organisasi itu bernama PATRI (Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia). PATRI adalah sebuah organisasi yang mewadahi anak keturunan kolonisasi, koeli kontrak, romusha/pekerja rodi, transmigran lokal, transmigran pendatang, dan eks repatriation Suriname. Sejak didirikan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2004, hingga saat ini PATRI telah mempunyai 23 Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat Provinsi, 183 Dewan Pengurus Cabang (DPC) tingkat kabupaten/kota, dan ratusan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) di tingkat kecamatan, serta Ranting di desa dan unit-unit permukiman transmigrasi.

Fenomena ini jelas menarik untuk dikaji. Karena, sejak lebih 100 tahun kolonisasi di Indonesia (dimulai tahun 1905) dan 57 tahun transmigrasi (1950), baru saat ini ada organisasi anak keturunan transmigran (the *Indonesia Transmigrant Descendant Association*) yang berskala nasional, dan bahkan punya jejaring di Suriname.

Hal ini sungguh membuka mata kita, ternyata transmigran yang selama ini dipersepsikan sebagai warga marginal di negerinya sendiri, mampu mengkonsolidasikan diri. Namun, untuk mencapai semua itu, dibutuhkan perjalanan lebih 10 tahun. Sesuai dengan tema: “Membangun Masyarakat yang Inovatif dan Kreatif”, maka dapat dikatakan bahwa rekaman proses

pembentukan PATRI merupakan puncak inovasi dan kreativitas yang telah lama dinantikan.

Mengapa PATRI bisa solid? Tentu ada faktor-faktor pemersatu yang secara ideologis dan psikologis tertanam dalam setiap anggota dan kader organisasi tersebut. Faktor pengikat tersebut diantaranya rasa senasib sepenanggungan, keprihatinan, kesederhanaan, kerja keras, dan hidup serba terbatas selama menjadi transmigran. Soliditas tersebut ternyata telah terbukti. Di beberapa propinsi penerima transmigrasi (Sumatra Utara, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan lainnya) para pengurus PATRI secara sukses menduduki kursi rektor perguruan tinggi negeri, bupati dan walikota (atau wakilnya), perwira tinggi TNI/POLRI, anggota legislatif (DPR RI maupun di provinsi dan kabupaten/kota). Jika dilacak secara filosofis dan psikologis, hakikat transmigrasi adalah suatu perpindahan, hijrah, migrasi, dan upaya untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik<sup>2</sup>.

PATRI saat ini ibarat “kupu-kupu” yang masih ada residu psikologis sebagai ulat. Kupu-kupu adalah simbol keindahan, mobiltas vertikal, dan disukai petani. Sebaliknya, ulat adalah binatang yang dianggap merugikan petani, menjijikan, dan ditakuti. Kini PATRI sudah menjelma menjadi kupu-kupu. Oleh karena itu realitas metamorfosis ini harus segera disadari melalui proses penguatan kapasitas dan gerakan penyadaran. Bahwa, walaupun awalnya para orang tua mereka dianggap sebagai kaum marginal dinegeri ini, tetapi ternyata anak keturunannya mampu mengkonsolidasikan diri dalam bentuk organisasi kekuatan massa yang luar biasa.

Semoga tulisan ini dapat menjadi pembuka bagi komunitas peneliti ilmu-ilmu humaniora untuk mengkaji lebih lanjut fenomena organisasi anak keturunan transmigran di Indonesia.

---

<sup>2</sup>) Harry Heriawan Saleh (2005:75) mengulas tentang transmigrasi sebagaimana gerak perpindahan untuk mencapai kemenangan. Seperti ditulis dalam sejarah perpindahan bangsa-bangsa. Suku Aria primitif melahirkan peradaban Barat dan Timur. Migrasi orang Samiyah diantara sungai Eufrat dan Tigris, telah melahirkan peradaban besar di Sumeria, Babilon, dan Akadea. Juga Nabi Musa membawa kaumnya dari kekejaman Fir'aun dari Mesir ke Palestina. Demikian pula Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Sinergi mutualistik antara kaum muhajirin (pendatang) dan anshor (warga lokal) akhirnya membuahkan kemenangan.

### 1. Permasalahan Transmigrasi

#### a. Dari Kolonisasi ke Transmigrasi

Membicarakan transmigrasi, tak dapat dilepaskan dari sejarah program kolonisasi di Indonesia. Kolonisasi pertama kali dilaksanakan pada tahun 1905 di Gedung Tataan, Lampung, diyakini mengilhami adanya program transmigrasi di Indonesia. Program transmigrasi itu sendiri dimulai tanggal 12 Desember 1950 di Provinsi Lampung.

Semula kolonisasi dilakukan Belanda sebagai tanggapan atas tulisan C. Th. van Deventer, "*En Ereschuld*" (Utang Budi) yang dimuat dalam majalah *De Gids* tahun 1899. Tulisan itu menceritakan kemiskinan di Pulau Jawa akibat Peraturan Tanam Paksa (*Cultuur stelsel*). Tahun 1860 Multatuli (nama samaran Douwes Dekker, asisten residen Lebak, Banten) menulis buku Max Havelaar. Buku ini mengisahkan tentang penderitaan petani teh akibat tekanan pejabat pemerintah Belanda.

Tulisan itu kemudian mendapat tanggapan dari Raja Belanda, dan menugaskan Minister van Kolonien untuk melakukan program perbaikan. Sehingga Pemerintah Belanda mengenalkan Politik Balas Budi (*Etische Politiek*). Politik balas budi adalah upaya memperbaiki nasib warga pribumi, melalui irigasi, edukasi, dan kolonisasi.

Untuk merealisasikan hal itu, maka bulan November 1905 dimulailah pengiriman kolonisasi ke Gedung Tataan, Lampung sebanyak 155 KK (815 jiwa). Berturut-turut kemudian tahun 1906 sampai 1942 telah diberangkatkan sebanyak 30 kali, dengan tujuan Bengkulu (Kepahiang), Sumatra Selatan (Tugu Mulyo), Sumatra Utara, Jambi, Kalimantan Selatan (Kecamatan Purwosari Barito Kuala), Sulawesi (Wonomulyo, Palopo) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 60.155 KK atau 235.802 jiwa<sup>3</sup>.

Dimasa penjajahan, bahkan sebelum adanya pengiriman kolonis ke Lampung, pada tanggal 15 Agustus 1890, Belanda telah mengirimkan kolonis ke Suriname, sebuah negara jajahan Belanda di Amerika

---

<sup>3</sup>) Informasi lebih lanjut dapat dibaca pada Siswono Yudohusodo, dalam buku *Transmigrasi Kebutuhan Negara Kepulauan..* (halaman 73).

Latin. Komunitas yang berada di Suriname tersebut bekerja sebagai buruh kontrak di perkebunan tebu, perikanan, dan pertambangan<sup>4</sup>. Pada tahun 1955 ada sebagian warga Suriname asal Indonesia yang kembali ke Indonesia, kemudian ditempatkan di Tongar, Pasaman Barat, Sumatra Barat. Anak keturunan repatriasi Suriname ini juga aktif mendukung perkembangan kabupaten Pasaman Barat.

b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terhadap program transmigrasi sangat fluktuatif, sesuai dengan situasinya. Pengelolaan program ini juga silih berganti ditangani oleh kementerian berbeda-beda. Pertama kali ditangani oleh Biro Rekonstruksi Nasional (BRN) yang mengirimkan transmigran di Sumber Jaya Lampung (1955), Jawatan Transmigrasi, Departemen Sosial, Departemen Dalam Negeri, pernah juga Departemen Transkopemada (Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Daerah), Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (Nakertranskop), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Transmigrasi dan PPH, Kementerian Negara Transmigrasi dan Kependudukan (Era Gus Dur), dan saat ini dibawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan ketransmigrasian, yaitu:

- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1958 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi
- PERPU No. 29 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi
- Perpres No.5 tahun 1965 tentang Gerakan Nasional Transmigrasi
- UU No. 3 Tahun 1972 tentang Pokok-pokok Ketransmigrasian, dan kemudian
- UU No. 15/1997 tentang Ketransmigrasian.

Berdasarkan UU No. 15 tahun 1997, tujuan pokok transmigrasi adalah:

- Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat disekitarnya

---

<sup>4</sup>) Pada tanggal 4-8 Desember 2004 Tim dari Depnakertrans dan DPP PATRI melakukan kunjungan ke Suriname. Dari kunjungan tersebut dapat diinformasikan bahwa komunitas dari Indonesia sudah ada 4 orang menjadi Menteri, Tokoh Politik, dan anggota Parlemen.

- Meningkatkan pembangunan daerah
- Memantapkan kesatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun tolok ukur keberhasilan program transmigrasi adalah:

- Pengentasan kemiskinan, terutama petani di pedesaan
- Menciptakan desa-desa baru dengan usaha tani yang lebih modern
- Mempersatukan bangsa Indonesia dalam mozaik pada skala provinsi, kabupaten, kecamatan, dan satuan desa (unit permukiman transmigrasi-UPT)

Kebijakan transmigrasi pernah menjadi sorotan negatif, karena dianggap sebagai perusak lingkungan, isu jawnisasi, islamisasi, pemindahan kemiskinan, dan lain-lain. Karena begitu gencarnya pemberitaan di media massa, maka akhirnya banyak warga transmigran yang merasa minder (rendah diri) dengan statusnya itu. Bahkan, sebagian besar warga transmigran berusaha melupakan, menghindari, atau merasa malu mengakui sebagai anak keturunan transmigran.

c. Warga dari kelompok marginal

Setelah berdirinya PATRI, situasi psikologis ini terungkap. Dalam setiap acara dialog dengan warga transmigran, baik secara personal maupun kelompok, mereka mengeluhkan sikap pemerintah daerah yang kurang mengakomodasi permasalahan mereka. Permasalahan yang hingga saat ini masih krusial adalah status hak milik atas tanah.

Bahkan warga eks transmigran seperti dikucilkan di ditanah airnya sendiri. Hal ini semakin membuat frustrasi, antipati, rendah diri, dan bahkan rasa kebencian tersembunyi. Banyak produksi pertanian yang tidak dapat dipasarkan karena jarak dari unit permukiman ke pusat kota sangat jauh, sulit dicapai, dan bahkan tidak ada alat angkut.<sup>5</sup>

Barangkali situasi ini mirip dengan nasib para tenaga kerja yang bekerja di luar negeri sebagai TKI/TKW. Apa bedanya pekerjaan yang dilakukan TKI sebagai buruh kebun sawit di Malaysia dengan transmigran yang menjadi petani sawit? Mengapa TKI mau berkorban mengeluarkan dana supaya bisa menjadi buruh di kebun

---

<sup>5</sup>) Beberapa unit permukiman transmigrasi di Kalimantan Tengah (diantaranya Seruyan Hilir), Sulawesi Tengah (seperti Diat Momunu) selain jarak yang jauh, alat angkut tidak tersedia. Sehingga hasil pertanian (singkong, pisang, pepaya, dan lain-lain) tidak terjual dan membusuk.

sawit milik orang lain? Sementara itu, untuk menjadi calon transmigran pemerintah harus melakukan sosialisasi yang cukup lama? Hal itu juga perlu menjadi catatan khusus, bahwa menjadi transmigran bukanlah suatu profesi yang membanggakan.

Problema ketenaga kerjaan kita memang sangat kompleks. Didalam negeri mereka susah mendapatkan lapangan kerja. Sementara itu, ketika mendapatkan kesempatan kerja di luar negeri pihak pemerintah sangat rendah melakukan perlindungan. Tetapi, ketika pulang dari luar negeri mereka dikenakan pungutan liar oleh oknum di bandar udara.

Demikian pula halnya dengan warga transmigran. Mereka telah bekerja keras tak kenal lelah. Ditempat yang baru dibuka, bahkan di beberapa tempat dimasa lalu masih berupa hutan sekunder. Akses jalan, penerangan, pendidikan, dan kesehatan serba sulit. Dengan situasi yang penuh keprihatinan mereka tetap berusaha, agar suatu saat dapat mengatasi permasalahan hidupnya. Namun nyatanya, keberhasilan yang dilakukan tak sebanding dengan penghargaan yang diberikan. Misalnya sekedar memperbaiki akses jalan penghubung, sekolah, atau kunjungan pejabat ke unit permukiman transmigrasi.

d. Efek psikologis media massa

Menurut Siswono Yudohusodo (2003), paling tidak ada 8 alasan mengapa transmigrasi dimusuhi atau ditolak oleh pemerintah daerah, yaitu:

1. Pemerintah dianggap hanya mementingkan etnis pendatang (transmigran) dalam pemberdayaan dan pembinaan di UPT
2. Sistem pembinaan dilakukan secara sentralistik dan standar, sehingga kearifan budaya lokal nyaris tidak berkembang
3. Proses perencanaan kurang dikomunikasikan dengan masyarakat sekitar
4. Penggunaan areal hutan sering mengakibatkan perubahan agroklimat dan kerusakan lingkungan
5. Transmigran yang didatangkan kurang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat
6. Terjadinya distorsi dalam pengelolaan (manajemen) yang cenderung berorientasi proyek
7. Pembangunan permukiman transmigrasi eksklusif, sehingga dirasakan kurang keterkaitan secara fungsional dengan kawasan sekitarnya

8. Banyak permukiman transmigrasi yang tidak layak huni, layak usaha, layak berkembang dan justru menjadi desa tertinggal.<sup>6</sup>

## 2. Kontribusi Program Transmigrasi

### a. Kota-kota eks permukiman transmigrasi

Yang paling menonjol kontribusi transmigrasi pada era otonomi daerah, sejalan dengan perkembangan waktu, adalah tumbuhnya kota dan kabupaten baru yang awalnya merupakan unit permukiman transmigrasi. Berdasarkan data tahun 2003, ada 66 kabupaten dan kota tersebar di 16 provinsi. Tahun 2007 ini ada 2 kabupaten di provinsi Sulawesi Barat, dan 1 kabupaten di Lampung (dalam proses). Sehingga jumlah terakhir hingga saat ini adalah 69 kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut:<sup>7</sup>

Tabel-1. Kabupaten/Kota Eks Unit Permukiman Transmigrasi

No	Provinsi	Nama Kabupaten/Kota (nama Ibukota)	Jumlah
01	Aceh	Aceh Besar (Jantho), Bireun (Bireun), Nagan Raya (Suka Makmoe), Aceh Jaya (Calang), Aceh Singkil (Singkil)	5
02	Sumatra Utara	Mandailing Natal (Panyabungan)	1
03	Riau	Rokan Hulu (Pasir Pangarayan), Rokan Hilir (Bagan Siapi-api), Siak (Siak Sri Indrapura), Pelalawan (Pangkalan Kerinci), Kuantan Singingi (Teluk Kuantan)	5
04	Kepulauan Riau	Natuna (Natuna)	1
05	Sumatra Barat	Mentawai (Tua Pejat), Pasaman Barat (Simpang Empat), Darmasraya (Pulau Punjung), Solok Selatan (Moulaboh)	4
06	Jambi	Muaro Jambi (Muaro Jambi), Tanjung Jabung Barat (Kuala Tungkal), Tanjng Jabung Timur (Muara Sabak), Tebo (Muara Tebo), Bungo (Muara Bungo), Merangin (Bangko), Sarolangun (Sarolangun)	7
07	Bengkulu	Muko-Muko (Muko-Muko), Kaur (Bintuhan), Seluma (Seluma), Bengkulu Utara (Arga Makmur)	4

<sup>6</sup>) Lebih lanjut dapat dibaca pada Siswono Yudo Husodo (2003): Transmigrasi Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang (hal.249) Edisi khusus HBT ke-53.

<sup>7</sup>) Disalin dari buku Membangun Daerah Bersama Transmigrasi, diterbitkan oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Desember 2004. Data Sulawesi Barat berdasarkan situs: [www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id)



08	Sumatra Selatan	Banyuasin (Banyuasin)	1
09	Lampung	Kota Metro (Kota Metro), Tulang Bawang (Tulang Bawang), Lampung Timur (Sukadana), Way Kanan (Blambangan Umpu), Tanggamus (Kota Agung), Pesawaran (dalam proses)	6
10	Kalimantan Barat	Bengkayang (Bengkayang), Melawi (Nanga Pinoh)	2
11	Kalimantan Tengah	Barito Utara (Muara Teweh), Murung Raya (Puruk Cahu), Barito Selatan (Buntok), Barito Timur (Tamiyang Layang), Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun), Sukamara (Sukamara), Lamandau (Nanga Bulik), Kotawaringin Timur (Sampit)	8
12	Sulawesi Tenggara	Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton, Kota Bau-bau (Bau-bau)	5
13	Sulawesi Tengah	Parigi Moutong (Moutong), Morowali (Bungku), Buol (Buol), Toli-Toli (Toli-Toli), Tuju Una-Una (Ampana)	5
14	Maluku Utara	Halmahera Utara (Tobelo), Halmahera Timur (Maba), Halmahera Selatan (Labuha), Kepulauan Sula (Sanana)	4
15	Irian Jaya Barat	Teluk Bintuni, Kota Sorong, Raja Empat, Sorong Selatan	4
16	Papua	Merauke (Merauke), Sarmi, Kota Jayapura (Jayapura), Waropen, Keerom	5
17	Sulawesi Barat	Mamuju Utara, Mamuju	2

Berdasarkan data di atas, sangat jelas bahwa peran transmigrasi, dalam hal ini warga transmigran, telah terbukti secara signifikan memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah, terutama kontribusi dalam penambahan jumlah SDM (antara 20 – 80%) yang memungkinkan suatu wilayah memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru. Sebagai contoh: Provinsi Riau sebanyak 11,68 % adalah berasal dari warga transmigran resmi, di Natuna Kepulauan Riau, sebanyak 10,20% adalah transmigran, di Jambi lebih 20 % berasal dari warga transmigran. Demikian pula halnya di Sumatra Selatan (lebih 16%), Lampung, Sulawesi Barat, Papua, dan Maluku. Selain data resmi tersebut di atas, data migrasi spontan diperkirakan lebih banyak lagi. Sehingga diperkirakan jumlah warga dan anak keturunan eks kolonisasi, transmigran (lokal dan pendatang), koeli kontrak, romusha, dan eks repatrian Suriname,

baik yang masih tinggal di daerah penempatan awal maupun yang kembali ke daerah asal (Jawa, Bali, Madura) mencapai 18 – 20% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia (tahun 2004 sebanyak 220.953.634 jiwa)<sup>8</sup>

Kerja keras yang telah ditunjukkan dalam fakta dan data tersebut dalam realitasnya tidak disertai penghargaan secara proporsional kepada warga transmigran. Situasi psikologis ini bertahun-tahun hanya menjadi harapan, kapanan anak keturunan transmigran bersatu dan berani mengekspresikan dirinya?

b. Aksesibilitas daerah

Setiap pembangunan permukiman baru selalu dimulai dengan membuka akses jalan penghubung terlebih dahulu. Jalan penghubung tersebut bisa berasal dari jalan setapak yang telah ada, kemudian diperluas. Ada pula jalan yang benar-benar dibuat baru untuk kepentingan arus mobilitas kelokasi dan dari lokasi permukiman.

Jalan rintisan tersebut secara otomatis membuka isolasi antar wilayah pada pada provinsi penerima transmigran. Berikut ini disajikan data sampel kontribusi infrastruktur di beberapa provinsi penerima transmigran, sebagai berikut:

Tabel-2. Kontribusi Infrastruktur di tiap provinsi

No	Provinsi	Panjang Jalan dan Jembatan
01	Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan poros/penghubung: 939,29 km</li> <li>• Jalan desa: 1.502,54 km</li> <li>• Jembatan semi permanen: 4.815,14 m</li> </ul>
02	Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan poros/penghubung: 2.112, 59 km</li> <li>• Jalan desa: 4.646 km</li> <li>• Jembatan semi permanen: 1.487 m</li> </ul>
03	Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan poros/penghubung: 40 km (di Natuna)</li> <li>• Jalan desa: 80 km (di Natuna)</li> <li>• Jembatan semi permanen: 360 m (di Natuna)</li> </ul>
04	Jambi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan poros/penghubung: 2.523,70 km</li> <li>• Jalan desa: 3.014, 29 km</li> <li>• Jembatan semi permanen: 7.059,5 m</li> </ul>

<sup>8</sup>) Sumber data: [www.wikipedia.com/Jumlah wilayah administratif di Indonesia](http://www.wikipedia.com/Jumlah_wilayah_administratif_di_Indonesia)

05	Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan poros/penghubung: 1.367.415 km</li> <li>• Jalan desa: 1.367,42 km</li> </ul>
06	Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan poros/penghubung: 738,48 km</li> <li>• Jalan desa: 1.129,12 km</li> <li>• Jembatan semi permanen: 7.331,50 m</li> </ul>
07	Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan poros/penghubung: 2.076,81 km</li> <li>• Jalan desa: 4.075,89 km</li> <li>• Jembatan semi permanen: 12.383,89 m</li> </ul>
08	Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan poros/penghubung: 1.043,12 km</li> <li>• Jalan desa: 1.702,19 km</li> <li>• Jembatan semi permanen: 5.698 m</li> </ul>
09	Sulawesi Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan poros/penghubung: .2668,62 km</li> <li>• Jalan desa: 1.967 km</li> <li>• Jembatan semi permanen: 8.429,85 m</li> </ul>
10	Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan poros/penghubung: 237 km</li> <li>• Jalan desa: 474 km</li> <li>• Jembatan semi permanen: 1.920 m</li> </ul>
11	Papua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan poros/penghubung: 1.465,20 km</li> <li>• Jalan desa: 1.373,09 km</li> </ul>

Sumber: Membangun Daerah Bersama Transmigrasi, 2004

c. Dukungan sektor pertanian dan tenaga kerja

Sejak dilaksanakan kolonisasi (1905) hingga tahun 1998, telah dipindahkan 1.859.522 Kepala Keluarga (KK), berarti telah diserap tenaga kerja baru sejumlah tersebut. Jika tiap KK memperoleh 2 Ha, maka secara nyata telah terbuka lahan usaha pertanian baru seluas 3.719.044 Ha. Sejak 102 tahun kolonisasi dan 57 tahun transmigrasi, telah berkembang pula kekerabatan baru, perkawinan antar suku, dan efek migrasi spontan yang lebih besar lagi. Hal itu menyebabkan pertumbuhan penduduk yang berasal dari program transmigrasi yang berlangsung lebih 3 generasi semakin signifikan.

3. Desakan Situasi Otonomi Daerah

Pada awal reformasi, terutama dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah – OTDA); telah terjadi euforia yang berlebihan. Segala hal yang bernuansa program pusat (sentralistik) berusaha ditolak. Termasuk pula program transmigrasi, mendapat penolakan di daerah-daerah. Barangkali yang ditolak adalah proses sentralistik penyelenggaraan transmigrasi tersebut, dan bukan kepada manfaat dari program transmigrasi. Dampak dari penolakan tersebut

otomatis juga terimbas kepada warga transmigran. Mereka, karena mengacu kepada peraturan yang berlaku, setelah lebih 5 tahun (T+5) dibina oleh pihak penyelenggara (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi), diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat. Namun, dalam kenyataannya, ada Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) bermasalah dan menjadi korban kebijakan. Pihak Pemerintah Daerah merasa terbebani oleh eks UPT tersebut, sementara pihak penyelenggara sudah lepas tanggung-jawab.

Problema seperti ini merupakan situasi serba sulit bagi warga transmigran, yang dari segi apapun tidak mempunyai kapasitas, akses, apalagi otoritas agar dapat keluar dari kemelut. Berbagai demonstrasi eks UPT pola PIR dari Kalimantan Barat yang dilakukan dikantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta tak pernah mendapatkan penyelesaian secara komprehensif, karena alasan status UPT dianggap sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini menjadikan desa-desa eks UPT seperti komunitas tak bertuan. Pada awalnya PATRI berharap OTDA semakin mendekatkan jarak dan fokus pelayanan pimpinan daerah terhadap rakyatnya. Namun, setelah sekian lama berjalan, pemimpin daerah sebagai pelayanan publik tidak ada buktinya. Justru yang ada adalah raja-raja kecil.

Raja-raja kecil dan kelas penguasa baru, haruslah putra “asli” daerah. Walaupun secara realistis raja-raja kecil asli daerah tersebut banyak pula yang sejak lama tinggal dan dilahirkan di pulau Jawa, dan baru pulang kampung setelah adanya OTDA. Bahkan dalam pemahaman dan orientasi permasalahan kalah dibandingkan dengan anak keturunan transmigran yang sejak kolonisasi tinggal ditempat itu. Tetapi karena pengakuan “darah keturunan”, maka para penguasa baru putra asli daerah bersama kelompoknya merasa lebih berhak sebagai raja baru. Ketika pemilihan langsung, baik kepala daerah maupun anggota legislatif diberlakukan; warga yang tinggal di desa eks UPT hanya diminta dukungan suaranya, dan bukan untuk diakomodasikan atau dicarikan solusi atas problema yang dihadapinya. Ini adalah realitas yang sangat menyedihkan, dan sebuah tragedi terhadap hak-hak politik.

Maka, walaupun secara individu situasi itu tidak diharapkan, tetapi apa daya? Karena tidak ada kekuatan atau sarana yang dapat mengapresiasi harapan untuk diakui sebagai warga yang turut berjasa. Oleh karena itu, lahirnya PATRI seolah seperti membedah kebuntuan psikopolitik warga dan anak keturunan transmigran selama ini. Harapan besar segera disandarkan kepada PATRI, untuk mengatasi semua

permasalahan yang dihadapi warga transmigran tersebut. Posisi tawar secara politis semakin meningkat, sejalan dengan semakin kuatnya konsolidasi yang dibangun PATRI. Hal itu kelak terbukti dari beberapa pengalaman PILKADA di beberapa kabupaten/kota di daerah basis penempatan transmigran, para pengurus organisasi PATRI terpilih sebagai bupati (Lampung Timur), wakil bupati (Darmasraya, Pasaman Barat) walikota (Bandar Lampung, Metro) dan wakil walikota (Jambi). Dengan kata lain, tambang dan ladang suara dari warga transmigran yang selama ini sekedar objek perebutan elit politik, sekarang harus diperhitungkan sebagai syarat legitimasi dan kesetaraan.

#### 4. Kesadaran Wawasan Kebangsaan

##### a. Gejala sparatisme

Telah disadari oleh para Bapak Bangsa, bahwa Nusantara adalah negara kepulauan dengan berbagai keragaman agama, suku, dan budaya. Keberagaman itu, selain merupakan potensi juga ancaman. Karena keberagaman pulalah, pihak penjajah melakukan politik adu domba (*divide et impera*). Politik ini berhasil dilaksanakan untuk menguasai Indonesia selama 350 tahun.

Melawan penjajah melalui perjuangan bersenjata dimasa itu selalu kandas. Karena tidak ada koordinasi, berjuang atas kelompoknya sendiri, dan adanya potensi keragaman antar suku bangsa yang mudah diadu domba. Sehingga setiap upaya perlawanan bersenjata dapat dikalahkan melalui politik pecah belah; dimana sesama anak bangsa diprovokasi, diadu domba, dan kemudian dikalahkan.

Strategi melawan penjajah secara bersenjata tersebut akhirnya dirubah dengan pendekatan diplomasi. Setelah bersusah payah memperjuangkan kemerdekaan melalui jalur penyadaran bernegara, maka muncullah berturut-turut gerakan baru seperti Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908), Soempah Pemoeda (28 Oktober 1928), dan munculnya berbagai gerakan politik dari kaum terpelajar Indonesia.

Dengan mengkaji sejarah perjalanan bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan dan upaya mempertahankannya hanyalah ada kata kunci yang harus diperhatikan, yaitu: memahami realitas keragaman agama, suku, dan budaya; dan bagaimana upaya mempersatukannya.

Realitas ini telah melahirkan kesadaran baru, bahwa untuk dapat mempersatukan negara kepulauan yang sangat heterogen diperlukan

perekat nasional, baik secara ideologis maupun fisik. Itulah sebabnya, maka paham kebangsaan dijadikan alat perekat ideologis dan filosofis mempersatukan semua potensi keragaman lintas agama, suku, dan budaya tersebut.

Pada kenyataannya, lahirnya Gerakan organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain-lain tidak cukup kuat untuk melawan hegemoni penjajah. Oleh karena itu perlu adanya organisasi tingkat nasional yang bersifat lintas agama, suku, dan budaya. Karena melawan dan mengusir penjajah bukanlah tugas golongan agama, suku, dan budaya tertentu, tetapi kewajiban semua anak bangsa Indonesia. Maka kesadaran bersatu tersebut melahirkan semangat kebangkitan Nasional pada 20 Mei 1908. Kemudian, untuk mengisi semangat nasionalisme tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Sumpah Pemuda (Satu Tanah Air, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa – Indonesia) tanggal 28 Oktober 1928.

Titik kulminasi perjuangan pembebasan penjajahan itu akhirnya terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan fisik tahun 1945 tidak hanya dilakukan di Jawa dan oleh masyarakat Jawa saja, tetapi juga oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Kesadaran kebangsaan yang dibangun melalui Sumpah Pemuda tersebut kiranya merupakan perekat ideologis dan filosofis untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, keberhasilan mempertahankan Kesatuan dan Persatuan tersebut menunjukkan gejala mundur kebelakang. Jerih payah dan kerja keras yang dirintis para Pendiri Bangsa akan tereliminasi adanya sparatisme. Bisa jadi, sparatisme bukan sekedar rendahnya wawasan kebangsaan, tetapi karena kesalahan kebijakan dalam distribusi sumber daya alam yang telah lama terjadi sebagai akibat sistem pemerintahan yang sentralistik.

Oleh karena itu, kesadaran kumulatif yang ditunjukkan anak keturunan transmigran sejak tahun 1905 hingga saat ini dalam menjalankan fungsi perekat nasional menjadi kontribusi nyata dalam menjaga keutuhan NKRI.

b. Konflik lintas agama, suku, dan budaya

Adanya konflik antar suku yang terjadi di Kalimantan dan Maluku, pada dasarnya bukan konflik yang melibatkan atau adanya keterlibatan warga transmigran. Demikian pula konflik bersenjata di

Aceh, yang menyebabkan terjadinya eksodus warga transmigran besar-besaran dari Aceh, tidak ada keterlibatan warga transmigran. Konflik berbau etnik di Kalimantan dan Maluku adalah murni konflik antara warga pendatang non transmigran. Tetapi dampaknya mempengaruhi pencitraan terhadap program transmigrasi. Di Aceh, transmigran adalah korban kebijakan politik negara. Warga transmigran yang tidak tahu menahu persoalan pada akhirnya menjadi korban dan menderita. Semua usaha bertahun-tahun di tempat tinggalnya, seperti lahan sawit, kebun buah, rumah, ternak, dan kekayaan yang diperoleh melalui perjuangan keras, terpaksa harus ditinggalkan. Di Bireun, misalnya. Sebanyak 3.011 jiwa (88,38%) warga transmigran meninggalkan lokasi. Di Aceh Besar keluar lokasi 82,31%, Aceh Jaya 96,28%, dan Nagan Raya mencapai 90,80% transmigran terpaksa meninggalkan lokasi.<sup>9</sup>

Pada situasi seperti itu, maka warga transmigran yang tidak mempunyai sandaran harapan dan induk semang kelembagaan itu menjadi diaspora tak terarah. Bahkan mungkin ada yang menjadi pengemis, gelandangan, atau perilaku sosial menyimpang akibat stress. Siapa yang mau peduli nasib mereka? Maka, potensi yang telah terjadi selama ratusan tahun itu perlu diwadahi dalam institusi yang dapat menjadi “dewa penyelamat” bagi keberlangsungan masa depannya. Adakah partai politik, organisasi massa, atau institusi lain yang secara khusus mengakomodasi dan memperjuangkan nasib anak keturunan transmigran di Indonesia?

c. Sebuah keprihatinan lama

Keprihatinan demi keprihatinan yang dialami sejak transmigran datang dan beradaptasi di lokasi baru, kerja keras mengolah lahan, hidup dalam suasana keterbatasan, kesemuanya seperti menjadi sekolah alam yang berguna mengkristalkan keinginan untuk semakin kuat bertahan. Seperti terori Darwin, hanya kelompok yang kuat dan lolos seleksi alam yang dapat bertahan hidup (*survival of the fittes*). Inilah yang dapat diibaratkan atau dikorelasikan dengan perjuangan seekor ulat yang hendak melakukan perbaikan wujud yang lebih mulia. Dengan berpuasa, menahan haus dan lapar, dan dengan penuh kepasrahan tanpa syarat, akhirnya berubah menjadi wujud lain yang sangat menawan. Dalam konteks seperti itu, budaya keprihatinan dan perjalanan ruhani seseorang dalam masa-masa sulit tersebut akan semakin dekat dengan Tuhannya. Nilai religius yang

---

<sup>9</sup>) Sumber data dapat dilihat dari: Membangun Daerah Bersama Transmigrasi, hal. 1-8.

tertanam pada setiap warga yang merasa terdzolimi, seperti halnya kelompok marginal yang terusir dari kampungnya, semakin tertanam kuat, bahwa perjuangan mencapai keberhasilan sudah kian dekat. Semakin sulit dan melelahkan jalan hidup yang dilalui, menunjukkan semakin dekatnya keberhasilan dan kemuliaan. Jalan hidup berliku, mendaki, dan harus melawan gravitasi kemudahan, menjadi semacam kontemplasi jiwa untuk lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Itulah keyakinan terdalam pada setiap warga transmigran yang ada di unit-unit permukiman transmigrasi.

## 5. Lahirnya PATRI

### a. Hakikat Transmigrasi

Hakikat berasal dari bahasa Arab. Hakikat atau hakiki. Sesuatu yang haq, benar, dengan sebenar-benarnya. Transmigrasi berasal dari kata trans berarti lintas, dan migrasi berarti pindah. Dengan demikian transmigrasi diartikan pindah melintasi.

Perpindahan ini merupakan realitas sejarah umat manusia. Karena sejak zaman purba manusia sudah melakukan aktivitas berpindah itu sebagai bagian dalam mempertahankan eksistensinya, mencari suasana baru, dan untuk mengenal lebih luas makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Berdasarkan bukti arkeologis dijumpai adanya aktivitas perpindahan ras, seperti suku Aria ke arah selatan dan barat. Orang-orang Samiyah berpindah diantara sungai Eufrat dan Tigris, Mesir, Afrika Utara, dan melahirkan peradaban besar Sumeria, Akadea, dan Babilonia<sup>10</sup>.

Dalam kisah Rasul, Nabi Muhammad juga melakukan hijrah dari Makkah ke Medina. Sinergi simbiose mutualistik antara muhajirin (yang pindah) dengan masyarakat setempat (anshor) telah menjadikan kemenangan Islam dikemudian hari.

Dalam kisah pewayangan (purwa), warga Pandawa melakukan “babat alas” (membuka hutan) Wonomarto. Dalam proses pembukaan hutan tersebut banyak dijumpai hambatan, gangguan jin, gendruwo, ilu-ilu, banaspati, raksasa, dan kesulitan lainnya yang harus dihadapi. Dengan kesabaran, ketabahan, keteguhan, dan kemauan keras dalam situasi yang serba sulit, maka akhirnya jadilah hutan belantara

---

<sup>10</sup>) Lihat Harry Heriawan Saleh (2005).



menjadi Kerajaan Amarta yang kelak memenangkan Baratayuda melawan bangsa Korawa.

Kisah-kisah kepahlawanan dan keprihatinan dalam membuka hidup baru, baik dalam konteks agama maupun tradisi seni pewayangan tersebut sebagian besar dipersonifikasikan dalam diri warga transmigran. Sehingga, apapaun keadaannya, mereka berusaha untuk tetap teguh ketika telah meniatkan diri menjadi transmigran.

Kini, apa yang dilakukan para pendahulunya telah terbukti benar. Dengan adanya program transmigrasi telah melahirkan kemajuan, baik secara individu, kelompok, wilayah, dan bahkan negara. Dengan demikian semakin jelas, bahwa hakikat transmigrasi adalah upaya memanusiaikan manusia, dalam arti memberikan penghargaan yang tinggi atas harkat manusia dari keadaan papa, menjadi mulia. Penyadaran pemahaman hakikat transmigrasi ini juga menjadi salah satu faktor, mengapa keinginan mendirikan organisasi anak transmigran berskala nasional semakin mengerucut pada waktu itu.

b. Masa persiapan

Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia (PATRI) adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh anak keturunan Transmigran Republik Indonesia. Berdirinya PATRI tak lepas dari berdirinya organisasi lokal anak transmigran yang ada di unit-unit permukiman transmigrasi, kemudian berkembang hingga di ibu kota provinsi. Organisasi anak keturunan transmigran tersebut kebanyakan dipelopori oleh anak-anak transmigran yang berstatus mahasiswa dan pemuda. Mereka yang sedang menuntut ilmu di sekolah dan perguruan tinggi, terutama di ibu kota propinsi tujuan transmigrasi membentuk semacam organisasi yang lebih didasari oleh perasaan senasib sepenanggungan.

Beberapa contoh organisasi anak transmigran tersebut, baik yang beranggotakan pelajar, mahasiswa maupun pemuda antara lain: di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bernama Himpunan Pemuda dan Pelajar Muhajirin. Di Sumatra Utara ada Pujakesuma, di Provinsi Riau ada Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Makarti. Di Lampung, misalnya ada Paguyuban Pangenyonan (Lampung Selatan), Pakuwaja, Paku Banten, Jamur Kesuma, Organisasi Pemuda Triyana Putra (Transpolri Jayaguna II Gunungsugih), dan organisasi warga yang dinamakan sesuai dengan daerah asalnya sewaktu di Jawa. Demikian pula di Kalimantan Barat, ada Forum Pemuda, Pelajar, dan

Mahasiswa Transmigran. Sedangkan bagi anak-anak transmigran yang sedang kuliah dan mendapat beasiswa dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ada di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto juga membentuk Perhimpunan Mahasiswa Anak Transmigran. Di Provinsi yang lain, seperti Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua juga membentuk organisasi lokal serupa.

Fenomena seperti tersebut di atas adalah salah satu elemen pendorong dan penyemangat munculnya organisasi PATRI. Secara informal embryo kelahiran PATRI telah dirintis sejak tahun 1993. Ketika itu, atas inisiatif Menteri Transmigrasi (Ir. Siswono Yudohusodo) dibentuk Forum gabungan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), antara lain: PPMA, LP3ES, BISMI, dan Bina Desa bersama dengan Tim Departemen Transmigrasi. Forum itu bernama Forum Transmigrasi (FORTRANS). Ketua Fortrans adalah DR. M. Dawam Rahardjo, SE (PPMA) dan Sekretarisnya Ir. S. Pramono Budi (dari LSM Bina Sumberdaya Mitra -BISMI). Tujuan Fortrans tersebut adalah saling tukar menukar pengalaman, informasi dan kerjasama dalam proses pembangunan wilayah melalui transmigrasi. Forum ini pula yang mendorong terjadinya konsolidasi ide pembentukan organisasi anak transmigran yang berskala Nasional. Secara kebetulan Sekretaris Fortrans adalah seorang anak transmigran dari Lampung. Dengan adanya Forum tersebut maka ada kesempatan lebih luas bagi Sekretaris Fortrans untuk mengadakan konsolidasi kebeberapa daerah ketika mengunjungi unit permukiman transmigrasi. Selain itu, kristalisasi berdirinya PATRI juga didorong oleh upaya yang dilakukan oleh Yayasan Kepedulian Pendidikan Anak Transmigran (YKPAT). Yayasan ini menghimpun dana untuk membantu pembiayaan anak-anak transmigran yang saat itu menempuh pendidikan di Unsoed Purwokerto.

Sejalan dengan perkembangan waktu, berdirinya organisasi anak transmigran yang berskala Nasional baru dapat dibentuk secara formal pada tanggal 16 Februari 2004, ketika Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipegang oleh Jacob Nuwa Wea. Pada hari-hari pertama pendirian PATRI, dua orang anak transmigran yaitu Hasprabu dan Achmadi menghadap Direktur Jenderal Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi (Dirjen PSKT) Drs. Djoko Sidik Pramono, MM) meyampaikan niatnya. Spontan Dirjen PSKT bertanya: “Apakah anda tidak malu mengaku sebagai anak transmigran?” Dijawab kedua anak transmigran itu: ”Mengapa harus

malu?”<sup>11</sup> Maka, dari dialog bertiga diruang kerja Dirjen PSKT di Jln. Kalibata Jakarta tersebut berlanjut dengan menghubungi anak keturunan transmigran lain, yang ada diseluruh Indonesia.

Dalam hitungan hari, Panitia Pertemuan dibentuk, dan Sarimun Hadisaputra, seorang anak transmigran dari Sumberjaya Lampung yang saat itu sebagai Walikota Jakarta Barat menjadi sponsor organisasi itu. Hasprabu mengusulkan nama organisasi itu adalah PATRI. Secara harfiah patri berarti perekat, sodor, atau bahan dari timbal yang digunakan untuk menambal alat dapur terbuat dari logam, seperti wajan, dandang, atau bak mandi yang bocor.

Informasi berdirinya PATRI yang berskala Nasional ini segera menyebar, dan mendapat dukungan yang luar biasa dari para anak keturunan transmigran seluruh Indonesia, baik transmigran lokal (penduduk lama) maupun para penduduk baru. Hal ini dapat dibuktikan dengan tanggapan para tokoh anak keturunan transmigran yang ada. Berdirinya PATRI juga merupakan payung, yang mewadahi dan menghimpun organisasi yang bersifat lokal kedaerahan yang ada sebelumnya tersebut menjadi organisasi yang kokoh secara Nasional.

Pertemuan nasional pertama tanggal 16 Februari 2004 tersebut ditetapkan Musyawarah Nasional (MUNAS) Pertama, dan sebagai hari lahirnya PATRI. Dalam Munas pertama dipilih pula Dewan Pengurus Pusat periode 2004-2009, terdiri: Ketua Umum : Prof. DR. Ir. Muhajir Utomo, MSc, anak keturunan kolonisasi dari Lampung yang juga sebagai Rektor Universitas Negeri Lampung (UNILA). Ketua Harian: Drs. H. Sarimun Hadisaputra, M.Si seorang anak transmigran dari Lampung yang saat itu sebagai Walikota Jakarta Barat (saat ini, sebagai Direktur Eksekutif APEKSI). Sekretaris Jenderal dipilih Ir. Hasprabu, MM, anak transmigran Polri Jayaguna II dari Lampung. Bendahara Umum adalah Yana Achbarie, seorang anak transmigran dari Lampung yang berprofesi sebagai pengusaha.

Setelah tiga tahun berdiri, dari 23 provinsi tujuan transmigrasi, sudah ada 15 provinsi yang mengadakan Musyawarah Daerah dan membentuk Dewan Pengurus Daerah (DPD). Pada tahun 2007 ada 22 Provinsi yang sudah menerima mandat pembentukan DPD PATRI.

---

<sup>11</sup>) Kuitipan dialog itu tertulis dalam Sambutan Dirjen PSKT pada Buku Rekaman Proses Pelaksanaan MUNAS I tahun 2004.

Sedangkan yang sudah dilantik/dikukuhkan ada 14 (empat belas) Dewan Pengurus Daerah di 14 Provinsi. Sebagai organisasi kemasyarakatan PATRI juga telah terdaftar secara resmi pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri, dengan nomor: 10/D.III.3/IX/2004. Dengan adanya surat tanda terdaftar tersebut maka secara legal formal PATRI dapat memperluas aktivitasnya untuk seluruh Indonesia. Adapun DPD PATRI yang sudah dilantik oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) ada 14 (tiga belas) Provinsi yaitu:

Tabel-3. Daftar Dewan Pengurus Daerah PATRI

No	PROVINSI	PELANTIKAN	KETUA
01	Kalimantan Selatan	Banjarmasin, 07 Maret 2004	H. Suripno Sumas, SH, MH
02	Kalimantan Barat	Pontianak, 27 Maret 2004	Achmadi, SPd
03	Aceh	Banda Aceh, 06 Mei 2004	Drs. Achmad Ghozin, MPd
04	Lampung	Bandar Lampung, 20 Mei 2004	Prof.DR.Ir.Sugeng P Harianto, MS
05	Riau	Pekan Baru, 28 Mei 2004	Ir. Sukamdi
06	Kalimantan Tengah	Palangkaraya, 05 Juni 2004	Ir. Kusnadi B Halijam
07	Sumatera Selatan	Palembang, 12 Juni 2004	Ir. Ngatijan, MM
08	Nusa Tenggara Barat	Mataram, 19 Juni 2004	Ir. Drs. M. Syaugie, MM
09	Sulawesi Tenggara	Kendari, 10 Juli 2004	Drs. I Ktut Swardika, MPd
10	Papua	Jayapura, 11 September 2004	Drs. FX Suwanto, MS
11	Sumatra Barat	Padang, 09 Desember 2004	Drs. Sumpono, MM
12	Kalimantan Timur	Balikpapan, 20 Juni 2005	Drs. Riswadi
13	Maluku Utara	Ternate, 25 Agustus 2005	Edy Sutrisno, SPd
14	Sulawesi Barat	Mamuju, 16 April 2007	Muh. Arifin, SH

Pada tanggal 29-31 Januari 2009 PATRI melaksanakan Musyawarah Nasional (MUNAS) ke II, bertempat di Gedung Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah.

Dalam Munas yang dihadiri seluruh perwakilan DPD dan DPC PATRI seluruh Indonesia dipilih kembali Prof.DR.Ir. Muhajir Utomo, M.Sc sebagai Ketua Umum DPP PATRI masa bakti 2009-2014<sup>12</sup>.

### c. Ideologi Rasa Senasib

<sup>12</sup>) Laporan lengkap pelaksanaan Munas II tahun 2009 dan hasil-hasil Munas tersebut dapat dilihat pada dokumen DPP PATRI berjudul: Dinamika Munas II. Anggota PATRI diperluas terdiri dari anak keturunan Kolonisasi, Transmigran, Koeli Kontrak, Eks Romusha, Eks Repatrian Suriname.

Potensi dan anugerah yang diberikan Allah kepada PATRI sebagai embrio organisasi yang besar dimasa depan sudah sangat nampak. Sebagaimana umumnya, sebagai suatu organisasi modern, PATRI harus mempunyai visi, misi, tujuan, dan program yang jelas. Visi yang dipilih PATRI adalah: “Kembalinya Gerakan Transmigrasi sebagai Perikat Nasional Lintas Agama, Suku, dan Budaya”.

Untuk melembagakan potensi ikatan emosional dan rasa senasib sepenanggungan, dipetakan kekuatan dan harapan PATRI kedepan. Potensi yang dimiliki PATRI sebagai prasyarat organisasi besar dimasa depan diantaranya:

- (1) Mempunyai visi, misi, dan tujuan yang jelas
- (2) Mempunyai sumber kader yang potensial
- (3) Mempunyai aturan organisasi yang jelas
- (4) Mempunyai massa pendukung yang jelas
- (5) Mempunyai basis dukungan geografi yang jelas

Dengan lima kriteria tersebut, maka kita coba membedah eksistensi PATRI kedepan seperti apa. Seperti diketahui, kehadiran PATRI lebih banyak merupakan ungkapan ekspresi kaum marginal, yang selama ini seperti “warga kelas dua” ditanah airnya sendiri. Pada awal-awal pembukaan UPT, hingga beberapa tahun kemudian diserahkan kepada pemerintah setempat; tidak semuanya berjalan mulus. Persoalan utama yang hingga saat ini membayangi warga transmigran adalah belum tuntasnya masalah lahan transmigrasi. Masalah pertanahan ini meliputi 30 % permasalahan yang ada di lapangan. Bahkan, lahan-lahan yang telah ditempati lebih dari 20 tahunpun masih menyisakan persoalan lahan ini.

d. Visi dan Misi

Visi: “*Kembalinya Gerakan Transmigrasi sebagai Perikat Nasional Lintas Agama, Suku, dan Budaya*”.

*Misi Pertama, Membangun persatuan dan kesatuan Bangsa dengan semangat keberagaman.*

Maksud Misi pertama PATRI adalah:

- Bahwa transmigrasi diselenggarakan untuk memelihara, menjaga, mempertahankan, memakmurkan dan mensejahterakan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Bahwa sangat disadari oleh para pendahulu kita, Indonesia adalah Negara dengan berbagai ragam budaya, suku, dan agama;

yang masing-masing keberagaman tersebut merupakan anugerah Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa

- Bahwa untuk mewujudkan Transmigrasi sebagai Perikat Nasional lintas Budaya, Suku, dan Agama, maka diperlukan adanya saling pengertian, pemahaman, penghargaan, dan kesadaran adanya keragaman tersebut
- Bahwa untuk merekatkan dan mendekatkan pemahaman tersebut diperlukan adanya wahana dan media, baik berupa kelembagaan maupun program. Adapun kelembagaan dan program yang dimaksudkan adalah adanya organisasi dalam skala Nasional
- Bahwa secara psikologis dan fakta sejarah menunjukkan hanya kelompok generasi muda yang selalu menjadi “ujung tombak” dalam setiap pergerakan Nasional. Oleh karena itu, anggota PATRI diharapkan dapat menjadi ujung tombak, pemikir, pemelihara, dan pelopor untuk membangun persatuan dan kesatuan yang dilandasi dengan semangat keberagaman tersebut.

*Misi Kedua. Mengembangkan sumberdaya kawasan transmigrasi demi kemaslahatan seluruh masyarakat*

Maksud Misi kedua PATRI adalah:

- Bahwa transmigrasi diselenggarakan untuk mendistribusikan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah tujuan transmigrasi itu bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitarnya, baik warga lama maupun warga baru.
- Bahwa sumber daya yang ada dikawasan transmigrasi tersebut dapat bermanfaat apabila dikelola dengan baik. Dengan demikian keberhasilan transmigrasi adalah keberhasilannya dalam mendukung pemerataan sumberdaya, pengalaman, kemampuan, dan pencerahan diantara warga baru dengan warga lama, yang pada gilirannya akan membawa kemajuan daerah dimana unit permukiman transmigrasi tersebut berada.

## 6. Kerjasama Luar Negeri

Belum satu tahun berdiri, tanggal 4-8 Desember 2004 PATRI mengadakan muhibah ke Suriname. Pemilihan Suriname ini mempunyai tujuan strategis. Selain karena adanya ikatan emosional antara Indonesia dengan warga Suriname yang berasal dari Indonesia; dalam jangka panjang diharapkan dapat diorganisasikan Perhimpunan Warga Migran seluruh dunia.

Hasil kunjungan tersebut, dengan disaksikan oleh Dutabesar Indonesia di Suriname, ditanda-tangani Nota Kesepahaman antara DPP PATRI, diwakili Sekjen DPP PATRI (Hasprabu) dengan SIFA (Suriname-Indonesia Friendship Association), diwakili Ketua SIFA Drs. Kadi Kartokromo. Setelah kembali dari Suriname, maka pada tanggal 24 Desember 2004 dibentuklah PEWARIS (Perhimpunan Warga Indonesia-Suriname). Berdasarkan kerjasama yang telah dibuat tersebut, maka pada saat acara Mengenang 100 tahun “kolonisasi” dan Memperingati 55 tahun Transmigrasi di Indonesia, diadakanlah seminar internasional tentang ketrasmigrasian Indonesia, tanggal 12 Desember 2005 di Lampung.

Hingga saat ini kedua organisasi tersebut terus memelihara komunikasi dan informasi untuk mendukung kerjasama antar warga negara yang lebih baik dimasa-masa mendatang.

## KESIMPULAN

- PATRI merupakan salah satu *stake holder dan share holder* utama transmigrasi. PATRI diharapkan juga dapat menjadi mitra Pemerintah dalam proses penyelenggaraan dan pembangunan transmigrasi di Indonesia.
- Keanggotaan PATRI meliputi anak keturunan Transmigran baik lokal maupun pendatang, eks kolonisasi, eks romusha, eks koeli kontrak, dan eks repatrian Suriname.
- PATRI sangat kental dengan semangat Nasionalisme, dibayangi oleh kekhawatiran terkoyaknya NKRI. Padahal, selama ini transmigran adalah salah satu elemen pendukung terjadinya integrasi nasional, akulturasi budaya, dan perekat nasional lintas agama, suku, dan budaya.
- Kehadiran PATRI merupakan simbol perlawanan spiritual kepada berbagai tindak kedzaliman yang selama ini menimpa warga transmigran. Itulah sebabnya, diberbagai daerah penerima transmigrasi, dukungan dan antusiasme terhadap PATRI begitu besar.
- Persiapan dan pengorganisasi kelahiran PATRI yang sangat sederhana pada tanggal 16 Februari 2004 juga menjadi pertanda, bahwa secara alamiah anak keturunan transmigran sudah dapat mengorganisasikan potensi yang dimilikinya.
- Keprihatinan, ketabahan, kesabaran, dan bahkan kekurangan makanan yang pernah dialami anak-anak transmigran dimasa lalu justru menjadikan pendidikan mental yang menjadi pemicu dan pemacu keberhasilan bersaing dalam kehidupan.
- Sekolah alam seperti itu memang hanya dimiliki oleh para kader PATRI. Oleh karena itu, pewarisan sikap mental penuh bersahaja itu menjadi modal dasar membangun dan membesarkan PATRI dimasa depan.
- Berdasarkan data yang ada, sudah banyak anak keturunan transmigran yang pernah menjadi pejabat eselon I, eselon II, Walikota, Bupati, Wakil Bupati, Guru Besar, Doktor, Perwira Tinggi TNI/POLRI, LSM, Pengusaha, Anggota Legislatif, dan lain-lain.
- Diharapkan PATRI menjadi sebuah organisasi penyumbang kader yang telah teruji secara psikologis, fisik, maupun mentalnya, sebagai penjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.



## PUSTAKA RUJUKAN

1. Akatiga (tt): Krisis dan Daya Tahan Masyarakat Miskin di Indonesia. Diterbitkan bekerjasama dengan The Asia Foundation.
2. Djoko Sidik Pramono (2003): Prospek Penyelenggaraan Transmigrasi di masa depan. Makalah Dirjen PSKT Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disampaikan pada seminar peringatan Hari Bakti Transmigrasi ke 53 tanggal 8 Desember tahun 2003 di Jakarta.
3. Harry Heriawan Saleh (2005): Transmigrasi Antara Kebutuhan Masyarakat dan Kepentingan Pemerintah. Penerbit Pustaka Sinar Harapan. Cetakan Pertama. Jakarta
4. INFID (2003): Creating Alternative for Indonesia. A collection of selected papers from International NGO Forum on Indonesia Development (INFID)'s Conference 2002 in Yogyakarta. Published in September 2003. Jakarta
5. Informasi tentang GAPRI, aliansi NGO anti pemiskinan lebih lanjut dapat dilihat pada : <http://www.smeru.or.id/newslet/2003/ed07/200307brief.htm>
6. Komite Penanggulangan Kemiskinan (2003): Dokumen Interim Strategi Penanggulangan Kemiskinan (Poverty Reduction Strategy Program). Penerbit Sekretariat Komite Penanggulangan Kemiskinan Jakarta. Januari 2003
7. Saraswati Sugiarto (2005): Berbagai Model Pemukiman Kembali. Studi Perbandingan Beberapa Negara. Penerbit Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Cetakan Pertama 2005
8. Sigit Wibowo dan Satoto Budi (2006): Sektor Usaha Terpuruk, Pengangguran Membludak. Tulisan pada harian Sinar Harapan, online diambil dari situs: <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0605/08/sh01.html>.
9. Siswono Yudohusodo (2003): Transmigrasi – Kebutuhan Negara Kepulauan Berpenduduk Heterogen dengan Persebaran yang Timpang. Edisi Khusus Hari Bakti Transmigrasi ke-53 tahun 2003. Jakarta.
10. Tim Penyusun (2004): Membangun Daerah Bersama Transmigrasi. Penerbit Badan Litbang dan Informasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jakarta. Edisi Desember 2003.
11. Undang – Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Diterbitkan Oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.